

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran 2019, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan . . .

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.2.845.928.583.000,00 bertambah sejumlah Rp.238.250.248.000,00 sehingga menjadi Rp.3.084.178.831.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- a. Semula Rp. 2.730.979.188.000,00
- b. Bertambah Rp. 100.800.702.000,00

Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan Rp.2.831.779.890.000,00

2. Belanja

- a. Semula Rp. 2.825.572.583.000,00
- b. Bertambah Rp. 238.250.248.000,00

Jumlah Belanja setelah

Perubahan Rp.3.063.822.831.000,00

Defisit setelah Perubahan (Rp. 232.042.941.000,00)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

- 1) Semula Rp. 114.949.395.000,00
- 2) Bertambah Rp. 137.449.546.000,00

Jumlah Penerimaan setelah

Perubahan Rp. 252.398.941.000,00

b. Pengeluaran . . .

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	20.356.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	<u>20.356.000.000,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	232.042.941.000,00	

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00
--	-----	------

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 326.366.340.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 32.876.539.000,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 359.242.879.000,00

 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp. 1.676.978.843.000,00
 - 2) Berkurang (Rp. 10.559.903.000,00)
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 1.666.418.940.000,00

 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp. 727.634.005.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 78.484.066.000,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 806.118.071.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp. 73.688.465.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 9.088.535.000,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 82.777.000.000,00

 - b. Retribusi . . .

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 18.793.303.000,00

2) Bertambah Rp. 1.618.916.000,00

Jumlah Retribusi Daerah

setelah Perubahan Rp. 20.412.219.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 17.441.032.000,00

2) Bertambah Rp. 1.574.588.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan setelah

Perubahan Rp. 19.015.620.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp. 216.443.540.000,00

2) Bertambah Rp. 20.594.500.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang sah setelah

Perubahan Rp. 237.038.040.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 32.716.611.000,00

2) Bertambah Rp. 963.517.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/

Bagi Hasil Bukan Pajak setelah

Perubahan Rp. 33.680.128.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 1.232.044.443.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum

Setelah Perubahan Rp. 1.232.044.443.000,00

c. Dana . . .

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 412.217.789.000,00

2) Berkurang (Rp. 11.523.420.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah Perubahan Rp. 400.694.369.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. 106.307.387.000,00

2) Berkurang (Rp. 1.936.600.000,00)

Jumlah pendapatan Hibah

setelah Perubahan Rp. 104.370.787.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pendapatan Dana Darurat

setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp. 167.489.403.000,00

2) Bertambah Rp. 13.685.666.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak

setelah Perubahan Rp. 181.175.069.000,00

d. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus setelah

Perubahan Rp. 0,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 66.735.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau setelah

Perubahan Rp. 66.735.000.000,00

f. Bagi . . .

- f. Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan
- | | | |
|--|-----|------|
| | Rp. | 0,00 |
|--|-----|------|
- g. Pendapatan Lainnya.
- | | | |
|--------------|------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>453.837.215.000,00</u> |
- Jumlah Dana Desa setelah Perubahan
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| | Rp. | 453.837.215.000,00 |
|--|-----|--------------------|
- h. Dana Desa
- | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 417.038.558.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 417.038.558.000,00)</u> | |
- Jumlah Dana Desa setelah Perubahan
- | | | |
|--|-----|------|
| | Rp. | 0,00 |
|--|-----|------|
- i. Dana Insentif Daerah.
- | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 36.798.657.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 36.798.657.000,00)</u> | |
- Jumlah Dana Insentif Daerah
- | | | |
|--|-----|------|
| | Rp. | 0,00 |
|--|-----|------|

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.878.624.965.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>59.662.158.000,00</u> |

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah perubahan Rp. 1.938.287.123.000,00

b. Belanja . . .

b. Belanja Langsung
1) Semula Rp. 946.947.618.000,00
2) Bertambah Rp. 178.588.090.000,00
Jumlah Belanja Langsung
setelah perubahan Rp. 1.125.535.708.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 1.139.932.215.000,00
2) Bertambah Rp. 26.898.808.000,00
Jumlah Belanja Pegawai
setelah perubahan Rp. 1.166.831.023.000,00

b. Belanja Bunga
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bunga
setelah perubahan Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Belanja Subsidi
setelah perubahan Rp. 0,00

d. Belanja Hibah
1) Semula Rp. 39.012.733.000,00
2) Bertambah Rp. 3.368.300.000,00
Jumlah Belanja Hibah
setelah perubahan Rp. 42.381.033.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial.
1) Semula Rp. 9.627.000.000,00
2) Bertambah Rp. 159.500.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial
setelah perubahan Rp. 9.786.500.000,00

f. Belanja . . .

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 11.552.770.000,00

2) Berkurang (Rp. 1.270.000.000,00)

Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah perubahan Rp. 10.282.770.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 673.500.247.000,00

2) Bertambah Rp. 30.505.550.000,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp. 704.005.797.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 5.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 26.896.245.500,00

2) Bertambah Rp. 489.532.500,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp. 27.394.778.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 637.943.030.972,00

2) Bertambah Rp. 48.808.256.581,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah perubahan Rp. 686.751.287.553,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 282.108.341.528,00

2) Bertambah Rp. 129.281.300.919,00

Jumlah Belanja Modal

setelah perubahan Rp. 411.389.642.447,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 114.949.395.000,00

2) Bertambah Rp. 137.449.546.000,00

Jumlah penerimaan setelah

perubahan Rp. 252.398.941.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 20.356.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran setelah

Perubahan Rp. 20.356.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula Rp. 114.949.395.000,00

2) Bertambah Rp. 137.449.546.000,00

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran

sebelumnya setelah perubahan Rp. 252.398.941.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan

setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan . . .

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah penerimaan pinjaman daerah

setelah perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian

pinjaman setelah perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah penerimaan piutang daerah

setelah perubahan Rp. 0,00

g. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah penerimaan kembali

penyertaan modal (investasi)

daerah setelah perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan

setelah perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

1) Semula Rp. 20.356.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal (investsi) daerah

setelah perubahan Rp. 20.356.000.000,00

c. Pembayaran . . .

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pembayaran pokok utang

setelah perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah

setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI . . .

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- 1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Peraturan Bupati sebagaimana ayat (1) apabila terjadi perubahan akibat adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis yang mempengaruhi program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan atau belum dianggarkan dalam APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran dengan cara :
 - a. menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Peraturan Bupati Pati tentang penjabaran Perubahan APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
 - b. menyusun RKAP-SKPD dan mengesahkan DPPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - c. dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 18 September 2019
BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 18 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.
SUHARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 6



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :
(6-319/2019)